

Pembangunan Keamanan Pangan

Purwiyatno Hariyadi,
 Guru Besar Institut Pertanian Bogor

Akhir-akhir ini, media ramai mengangkat isu keamanan pangan. Berbagai praktik pengelolaan pangan yang tidak aman, sehingga berpotensi menciderai kesehatan publik, diangkat dan bahkan diunggah ke berbagai media sosial. Hari ini juga menyoroti hal itu, antara diberitakan bahwa pada periode 2009-2013, terjadi sekitar 10.700 kasus kejadian luar biasa keracunan pangan yang menyebabkab 411.500 orang sakit dan 2.500 orang meninggal (Harian KONTAN, 1 Mei 2015). Demikian pula mengenai kasus pada beras (termasuk beras berpermutih) yang bisa menyebabkan permasalahan keamanan pangan.

Keamanan pangan memang berkaitan erat dengan kesehatan dan produktivitas penduduk. Dengan meningkatnya intensitas perpindahan barang (perdagangan) dan manusia (perjalanan) internasional, keamanan pangan telah menjadi isu global. Masalah keamanan pangan di suatu negara telah dianggap menjadi risiko global, terutama karena adanya interkoneksi dari jaringan rantai makanan global.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) jelas melihat dan mengakui ini, sehingga keamanan pangan dipilih sebagai tema Hari Kesehatan Dunia, diperingati pada 7 April 2015 lalu. WHO telah menyatakan bahwa keamanan pangan merupakan komponen penting dari program kesehatan global. WHO juga menyarankan pemerintah Indonesia memberikan prioritas lebih pada pembangunan keamanan pangan.

Saran WHO ini sangat relevan untuk Indonesia. Prioritas ini seharusnya lebih difokuskan pada pembangunan keamanan pangan pada usaha mikro dan kecil (UMK) pangan. Sebab, data menunjukkan masih banyak masalah keamanan pangan yang erat terkait dengan UMK ini.

Menurut data dari Biro Pusat Statistik (BPS, 2008) jumlah unit usaha di Indonesia mencapai angka 51,26 juta. Dari jumlah itu, perusahaan besar hanya mencapai 4.370 atau hanya sekitar 0,01% dari total unit usaha dan perusahaan menengah berjumlah sekitar 39.660 unit (0,08%). Sisanya, sekitar 99,9% masuk dalam kategori sebagai UMK.

Dari sisi jumlah, terlihat bahwa UMK jelas merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia. Data BPS juga menunjukkan bahwa sekitar 53,57% dari semua

pangan dan pertanian. Dengan demikian, UMK di Indonesia -selain sebagai tulang punggung perekonomian- juga berperan sebagai penyedia utama pangan olahan yang diproduksi di Indonesia.

Dari sisi keamanan pangan, UMK juga menunjukkan kinerja yang masih memprihatinkan. Dari data kejadian luar biasa (KLB) keamanan pangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), jumlah KLB keamanan pangan di Indonesia memang relatif rendah. Penyebabnya antara lain terkait dengan sistem pelaporan. Sebab, program *surveillance* oleh BPOM termasuk program baru yang dimulai sejak tahun 2004.

Standar CPPB rendah

Namun demikian, dari data yang agak terbatas itu, diketahui bahwa industri

si pangan yang diperiksa, sebanyak 2.271 (56,68%) dari fasilitas itu ternyata tidak memenuhi persyaratan minimum cara produksi pangan yang baik (CPPB). Sekitar 75,91% dari total industri rumah tangga tidak memenuhi persyaratan minimum untuk tempat usaha. Meskipun faktanya UMK adalah produsen utama pangan olahan, namun sebagian besar kesulitan untuk mempraktikkan cara produksi pangan yang baik.

Dengan meningkatnya persaingan global sebagai akibat dari kemajuan pesat dalam teknologi dan globalisasi, perlu dikembangkan keberpihakan dan pemberdayaan UMK pangan, supaya mampu memenangi tantangan persaingan global ini. Sebab, secara total struktur industri yang pada bagian bawah piramida didominasi oleh UMK, sangat logis kita untuk mendorong pemerintah untuk bisa mengembangkan program pemberdayaan UMK pangan, khususnya pembangunan keamanan pangan.

Untuk aspek keamanan pangan, UMK pangan di Indonesia memiliki beberapa kendala, terutama (i) pelaksanaan praktek-praktek higienis dan proses produksi yang baik, (ii) pengadaan prasarana dan fasilitas keamanan pangan, (iii) sumber daya manusia, (iv) sumber daya modal, dan (v) informasi dan pengetahuan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah, dengan mengembangkan kebijakan yang konsisten dan terpadu; didukung oleh kemauan politik dan perlindungan hukum yang diperlukan untuk pengembangan keamanan pangan. Dukungan untuk memastikan ketersediaan prasarana dan fasilitas keamanan pangan, bahan baku, dan ingredien pangan aman, dan alat bantu pengolahan (air bersih, es, listrik) serta bahan tambahan untuk menghasilkan makanan yang aman.

Karena besarnya masalah, ditambah dengan sumber daya pemerintah yang terbatas, untuk meningkatkan keamanan pangan UMK ini, diperlukan kemitraan antara semua pemangku kepentingan. Pendekatan kemitraan harus mampu meningkatkan daya saing UMK; tidak hanya untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan yang diproduksi, tetapi juga memperluas perdagangan komoditas pertanian/pangan dan serta peningkatan ekspor, serta meningkatkan daya saing UMK.

Pada gilirannya, kondisi ini bisa diharapkan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk UMK, mengurangi kemiskinan dan kekurangan gizi, serta memperluas kapasitas UMK. Secara keseluruhan, program strategis ini akan meningkatkan daya saing UMK dan berkontribusi untuk peningkatan kesehatan individu yang bermuara pada pe-



rumah tangga dan jasa boga merupakan fasilitas usaha pangan yang sering dikaitkan dengan KLB keamanan pangan. Sumbernya adalah kesalahan dasar dalam mempersiapkan makanan, sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan dasar tentang keamanan pangan dasar.

Dari jumlah 610 kasus KLB keamanan pangan yang tercatat dari tahun 2001-2006 - misalnya- sebagian besar disebabkan oleh mikroba. Hal ini menunjukkan bahwa akar masalah berkaitan dengan kurangnya sarana sanitasi dan praktik higienis oleh pelaku usaha UMK pangan.

Laporan lain dari BPOM (2007) menun-